

Kontroversi RUU Cipta Kerja

J. Danang Widoyoko

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Omnibus Law

- Memudahkan investasi asing dengan mempermudah dan menghilangkan hambatan birokrasi.
- Merugikan buruh – pasar perburuhan lebih kompetitif (PHK semakin mudah dan murah).
- Persyaratan lingkungan hidup yang ketat dilonggarkan.
- Mengambil kewenangan dari daerah dan Lembaga-Lembaga lain untuk mempercepat pelayanan dan investasi bisnis.

Pertanyaan

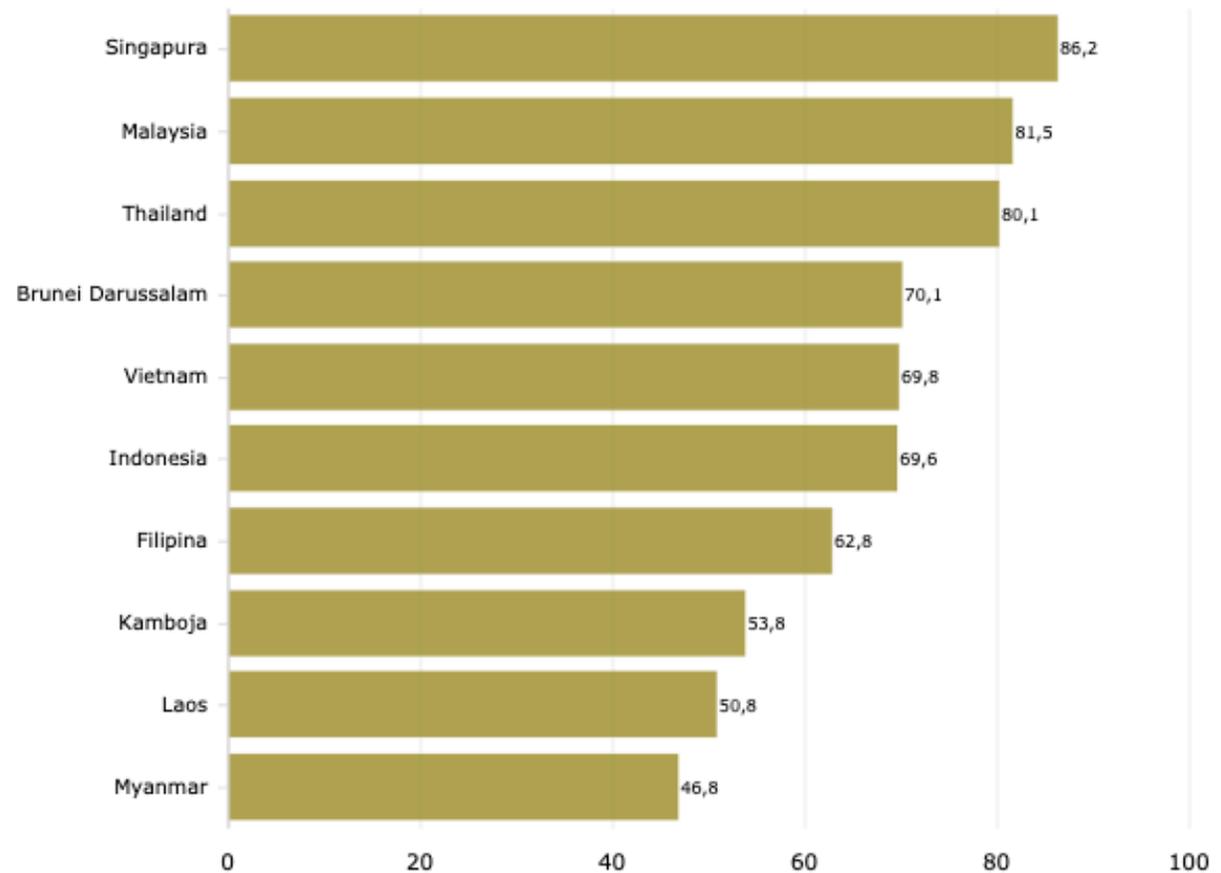
- Mengapa pemerintah membuat Omnibus Law – RUU Cipta Kerja?
- Bagaimana proses perumusan dan pembahasan Omnibus Law – RUU Cipta Kerja?

Indonesia Peringkat Kelima Terendah di ASEAN dalam Kemudahan Bisnis

Ease of
doing
Business
2020

Indikator Kemudahan Berbisnis 2020

Sumber : World Bank, 2019

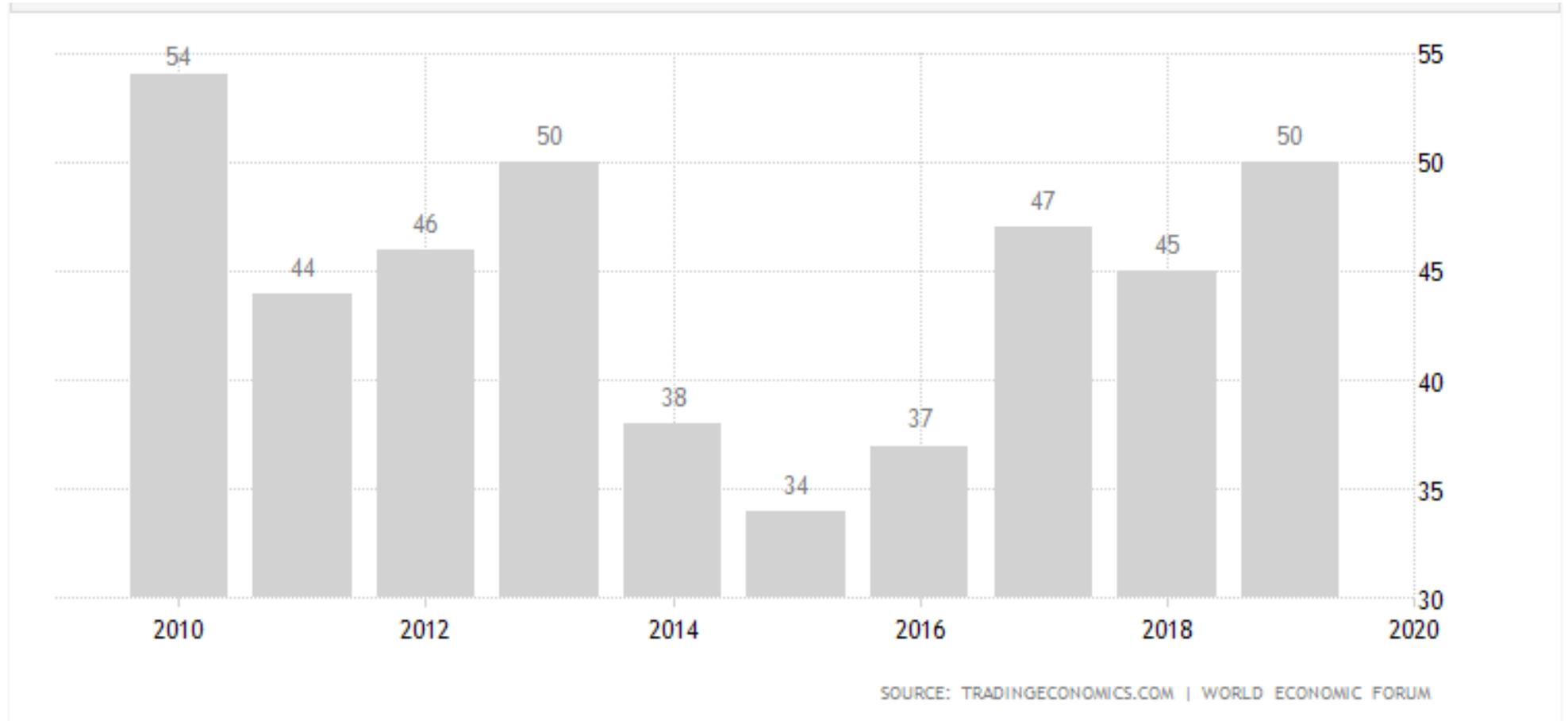


Peringkat kemudahan berusaha Indonesia

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Overall Ease of Doing Business rank	114	109	91	72	73	73
<u>Component rank:</u>						
Resolving insolvency	75	77	76	38	36	38
Enforcing contracts	172	170	166	145	146	139
Protecting minority investors	43	88	70	43	51	37
Starting a business	155	173	151	144	134	140
Getting electricity	78	46	49	38	33	33
Registering property	117	131	118	106	100	106
Getting credit	71	70	62	55	44	48
Dealing with construction permits	153	107	116	108	112	110
Paying taxes	160	148	104	114	112	81
Trading across borders	62	105	108	112	116	116

Source: World Bank.

Global Competitiveness Index 2020



Global Competitiveness Index 2020 – detailed indicators and ranks

Performance Overview 2019

Key ◇ Previous edition △ Lower-middle-income group average □ East Asia and Pacific average



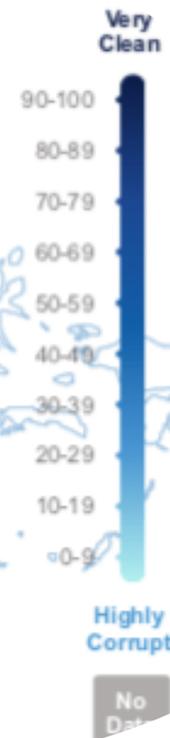
Indonesia's CPI 2019

Score

40

85

Rank

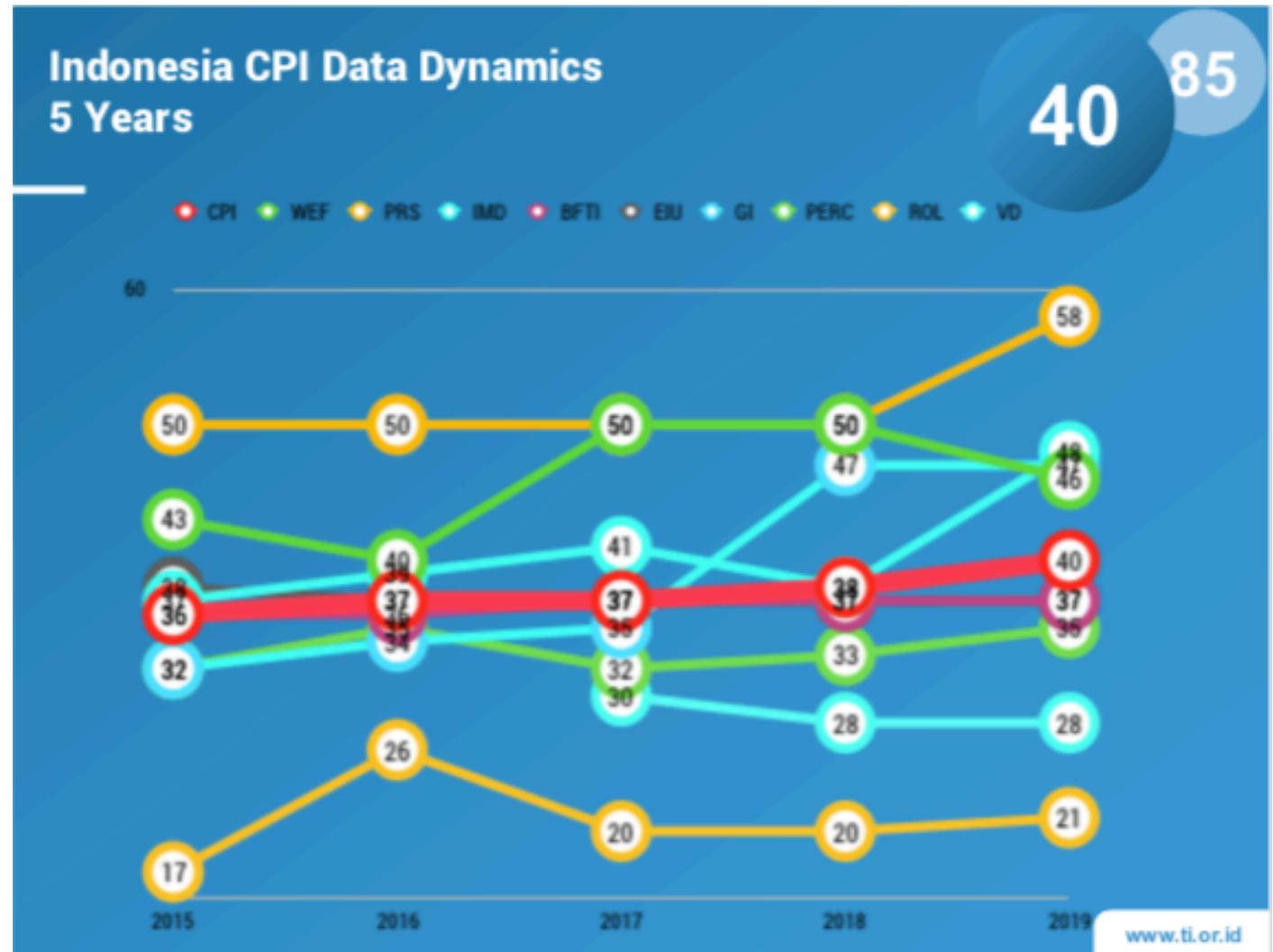


Corruption Perception Index

Data Pendukung CPI Indonesia

<p><u>WEF - EoS</u></p> <p>Suap & pembayaran ekstra pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impor & Ekspor - Pelayanan publik - Pembayaran pajak tahunan - Kontrak dan perizinan - Putusan pengadilan 	<p><u>Political Risk Service</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Korupsi dalam sistem politik - Pembayaran khusus & Suap ekspor-impor - Hubungan mencurigakan antara politisi & pebisnis 	<p><u>IMD World Competitiveness Yearbook</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Suap dan korupsi dalam sistem politik
<p><u>Bertelsman Foundation Transform Index</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian hukuman pada pejabat publik yg menyalahgunakan kewenangan - Pemerintah mengendalikan korupsi 	<p><u>Economic Intelligence Unit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yg jelas & akuntabilitas dana publik - Penyalahgunaan pada sumberdaya publik - Profesionalisme aparat sipil - Audit independen 	<p><u>Global Insight</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko individu/perusahaan dalam menghadapi praktik korupsi dan suap untuk menjalankan bisnis
<p><u>Political & Economic Risk Consultancy</u></p> <p>Grade korupsi sebuah negara</p>	<p><u>WJP - Rule Of Law Index</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan militer menggunakan kewenangannya untuk keuntungan/kepentingan pribadi 	<p><u>Varieties of Democracy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedalaman korupsi politik: - Korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif - Korupsi di birokrasi (eselon tertinggi dan kabinet) - Termasuk korupsi besar dan kecil yg mempengaruhi kebijakan publik

- Korupsi dalam pelayanan bisnis dan investasi telah mengalami perbaikan.
- Korupsi peradilan dan korupsi politik yang justru menyebabkan skor rendah CPI.



Mengapa pemerintah membuat RUU Cipta Lapangan Kerja?

- Indonesia berkompetisi dengan negara-negara Asia lain untuk menarik investasi asing.
- Investasi asing dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dsb.
- Secara umum, Indonesia telah memperbaiki iklim investasi.
- Selain kemudahan birokrasi dan pelayanan bagi bisnis, ada faktor lain: jaminan investasi, korupsi dan berbagai aspek dalam kelembagaan.
- Problem kelembagaan: demokrasi patronase (korupsi politik) dan korupsi peradilan.

Bagaimana proses pembahasan Omnibus Law?

- Proses pembahasan Omnibus Law terkait dengan dinamika politik.
- Menguatnya gerakan populis Islam dan persoalan ketimpangan ekonomi dan politik.
- Menurunnya demokrasi dan penggunaan strategi otoriter sebagai respon terhadap gerakan populis Islam. Pemerintahan Jokowi memperbesar koalisi untuk melemahkan dukungan bagi populis Islam.
- Karakteristik Presiden Jokowi – background non-elite, tidak mendapat dukungan penuh dari parpol, dibatasi dua periode yang singkat → butuh output nyata.

Merdeka > Peristiwa

Yasonna Minta Masyarakat Gugat ke MK Ketimbang Demo Desak Terbitkan Perppu KPK

Rabu, 2 Oktober 2019 12:03

Reporter : **Merdeka**



393
SHARES



Praktik
legislasi

Kritik atas pembahasan Omnibus Law

- Membatasi partisipasi publik. Jika tidak setuju, diarahkan ke MK karena Presiden merasa telah mendapatkan dukungan dari elit (memperbesar koalisi, merevisi UU KPK).
- Omnibus Law berpotensi menurunkan akuntabilitas praktik bisnis dan investasi untuk menarik modal global masuk ke Indonesia.
- Omnibus Law mengakomodir kepentingan bisnis (dan elit) dan pada saat yang sama membatasi partisipasi publik.
- Potensi korupsi justru akan semakin membesar karena institusi akuntabilitas semakin dilemahkan.
- Pembahasan Omnibus Law merefleksikan politik periode kedua Jokowi. Kompromi dengan kepentingan elit, menurunkan akuntabilitas, membatasi partisipasi, menggunakan cara-cara otoriter sebagai respon atas menguatnya gerakan populis Islam dan berbagai protes lain.

Penutup

- Dari survey persepsi korupsi (CPI), problem di Indonesia bukan pada pelayanan bisnis dan investasi tetapi justru pada praktik korupsi peradilan dan korupsi politik yang berakar pada demokrasi patronase.
- Sistem politik demokrasi mengatur agar semua pihak dilibatkan, semua aspirasi ditampung, dan kebijakan publik dirancang agar tidak merugikan kepentingan publik. Demokrasi membutuhkan waktu lama karena hendak memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.
- Pembahasan Omnibus Law membutuhkan waktu lama untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan membuka celah bagi praktik korupsi.

Politik makan siang ala Jokowi

Jumat, 27 September 2013 08:08

Reporter : [Aryo Putranto Saptohutomo](#)



Jokowi tanam pohon di Waduk Ria Rio. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Gubernur DKI **Jakarta, Joko Widodo**, nampaknya punya jurus jitu buat berkomunikasi dan meredam warganya yang tak sepaham. Caranya tak perlu aneh-aneh, apalagi sampai melakukan pemaksaan.

Buat **Jokowi**, sapaan **Joko Widodo**, caranya cukup bertemu dengan pihak yang memiliki aspirasi lewat jamuan makan siang. Ternyata hal itu cukup ampuh membantu mengomunikasikan keinginan pemerintah daerah supaya diterima warganya.



Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengajak makan siang perwakilan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, di Balaikota Jakarta (Selasa siang, 25/6). Selama ini, rencana normalisasi Waduk Pluit mendapat perlawanan sengit dari warga.

Sekian dan terima kasih